

## PENYALAHGUNAAN DANA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA

Syafiq Febriyanto<sup>1\*</sup>, R.Aj Cahya Dira Aulia Putri<sup>2</sup>, Irene Dwi Ardianty<sup>3</sup>, Ardiya Pramesti Regita Cahyani<sup>4</sup>, Mohamad Djasuli<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Indonesia

apiqpebri@gmail.com<sup>1\*</sup>, cahyadiraaulia@gmail.com<sup>2</sup>, irenedwii24@gmail.com<sup>3</sup>, ardiyacahyani05@gmail.com<sup>4</sup>, djasuli@trunojoyo.ac.id<sup>5</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 19, 2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> KIP-K Program, Penyalahgunaan, Dampak, Pendidikan</p>	<p>Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) adalah penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan beasiswa yang diberikan pemerintah untuk membantu calon mahasiswa yang kurang mampu dalam melanjutkan Pendidikan. Selaras dengan tujuan nasional Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah memberikan bantuan dana berupa biaya Pendidikan kepada penerimanya agar digunakan seefektif dan seefisien mungkin sebagai bentuk implementasi dari program wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dan pengaruh dari penyalahgunaan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan dana beasiswa tersebut telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya namun masih banyak pelaku pelanggaran dalam penyalahgunaan dana KIP-K ini yang tak sesuai tujuan Pendidikan. Pengaruh lingkungan memanfaatkan dana demi pemenuhan gaya hidup hedonisme, penerima salah sasaran serta kendala dalam pemenuhan syarat serta pengajuan yang rumit.</p>

### Abstract

*The Indonesian Smart College Card (KIP) scholarship program is a refinement of the Poor Student Assistance (BSM) program which is a scholarship provided by the government to help underprivileged prospective students continue their education. In line with Indonesia's national goal to make the nation's life smarter. The government provides financial assistance in the form of education costs to recipients so that they are used as effectively and efficiently as possible as a form of implementation of the government's 12-year compulsory education program. This research aims to find out the impact and influence of misuse in the implementation of the Smart Indonesia Card (KIP) program. The results of this research state that the use of scholarship funds has been utilized properly, but there are still many perpetrators of violations in the misuse of KIP-K funds which are not in accordance with educational objectives. Environmental influences use funds to fulfill a hedonistic lifestyle, wrongly targeted recipients and obstacles in fulfilling complex requirements and applications.*

**Keyword:** KIP-K Program, Abuse, Impact, Education

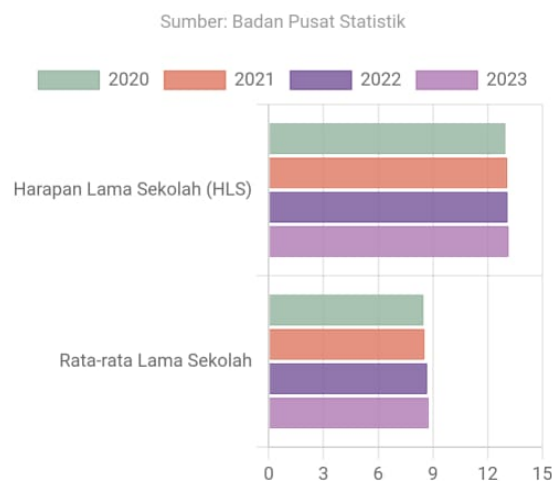
### I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan bermutu tinggi adalah hal yang diharapkan pada masa ini. Dimana dari beberapa faktor dapat mempengaruhi salah satunya yaitu pendidikan, pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena memiliki peran penting dalam upaya untuk mengembangkan kemajuan Negara di berbagai bidang kehidupan. Sarjono dan Wafroturrohman (2014: 3) mengatakan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan, strategi

pendidikan masa depan harus memungkinkan pembangunan untuk mencegah adanya masalah dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi transformasi secara cepat. Secara langsung, peran pendidikan adalah memberikan dan menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengajarkan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas individu serta membuat peluang untuk mendapatkan akses ke pekerjaan (Rizala, 2015). Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi tersebut dapat menjadi salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan yang dialami banyak orang.

Mendapatkan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dan hak yang harus diperoleh setiap anak dalam proses tumbuh dan perkembangannya (Trianti, 2018). Tidak terkecuali seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang sering dibidang kurang mampu, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang tertulis menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak untuk mengakses ke pendidikan. Dengan pendidikan yang baik dapat memberikan seseorang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mendapatkan pekerjaan dan dapat mencapai tingkat produktifitas yang tinggi sepanjang hidupnya. (Ustama, 2019). Pekerjaan pemerintah untuk mencapai kesetaraan pendidikan di Indonesia harus diapresiasi. Artinya pemerintah sadar akan kualitas pendidikan yang sedang tidak baik baik saja, banyak anak-anak yang seharusnya merasakan bangku sekolah harus pupus harapannya karna beberapa kendala terutama pada sektor ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah anak Sekolah Dasar (SD) yang tidak sekolah mencapai 0,71% , jumlah anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 6.94% dan di Sekolah Menengah Akhir (SMA) mencapai 22,52%. Data tersebut secara terang-terangan menunjukkan Indonesia telah kehilangan beberapa generasi emasnya, namun tetapi tanpa kita tidak sadari adanya pendidikan adalah salah satu cara untuk membangun dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Dimensi Pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020-2023



**Gambar 1.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 meningkat mencapai 0,84% dari tahun sebelumnya, menjadi 74,39 dari yang semula 73,77 pada tahun 2022. Angka ini juga lebih tinggi dari IPM tahun 2021 IPM yang sebesar 73,16 dan IPM tahun 2020 sebesar 72,81.

Kualitas hidup masyarakat adalah salah satu cara mengetahui tingkat keberhasilan negara. Skor dari IPM merupakan indikator pemerintah dalam mengevaluasi kinerja. Aspek yang mempengaruhi IPM diantaranya adalah Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata Rata Lama Sekolah (RLS) dan Standar Hidup Layak

Pada laporan IPM 2023 diatas terlihat adanya dimensi pengetahuan yang sangat meningkat. Harapan Lama Sekolah (HLS) rata-rata mencapai 0,43% per tahunnya. Dengan rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 1.13% per tahunnya.

Pemerintah menyadari akan hal tersebut dan mengambil langkah sigap untuk bersifat adil terhadap masyarakat di sektor pendidikan, yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan diri generasi emas bangsa Indonesia.

Langkah sigap pemerintah tersebut berupa sebuah program yang sangat diprioritaskan kepada Presiden RI Ke - 7 Ir. H. Joko Widodo, Peraturan Nomor 44 Tahun 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Standar Nasional Pendidikan, dari salah satu bentuk implementasi atas rencana dan aturan pemerintah Indonesia dalam memeberikan akses kesejahteraan Pendidikan bagi masyarakat yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Program Kartu Indonesia Pintar dirancang sebaik mungkin demi memerdekakan pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua orang dan mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dalam peluncuran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015 bertujuan untuk menambah akses pendidikan. Presiden RI Ir. Joko Widodo melakukan kerjasama dengan beberapa Kementrian di Indonesia yaitu : 1) Kementrian Agama, 2) Kementrian Sosial dan 3) Kementrian Pendidikan Kebudayaan.

Pada dasarnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah beasiswa yang diberikan kepada setiap individu yang membutuhkan. Beasiswa merupakan bantuan keuangan atau tunjangan yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pendidikan (Rangkuti, et al., 2023). Tujuan utama dari beasiswa adalah untuk meringankan biaya pendidikan, sehingga mahasiswa dari kalangan keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala masalah finansial. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkenalkan program KIP Kuliah Merdeka sebagai pengembangan dari program sebelumnya, untuk membantu siswa dari keluarga yang secara finansial kurang mampu melanjutkan pendidikan tinggi melalui peningkatan peluang ekonomi dan mobilitas sosial (Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, 2024).

Berdasarkan Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana untuk membantu memberikan beasiswa KIP Kuliah kepada 200 ribu mahasiswa penerima manfaat mulai dari awal menempuh pendidikan tinggi hingga menyelesaikan studi. Dalam hal ini, siswa yang berasal dari keluarga yang secara finansial kurang mampu agar diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yang mencakup bantuan biaya pendidikan dan juga bantuan biaya hidup selama menempuh pendidikan. Disamping itu, dalam program KIP-K masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan, yang harus terus menerus diperiksa dan diperbaiki. Pemerintah menghadapi sejumlah masalah dalam menjalankan program KIP-K. Salah satunya adalah kasus penyalahgunaan serta pemalsuan data, kurangnya sosialisasi terhadap cara penyaluran dana digunakan untuk program KIP-K tersebut.

Devas mengatakan bahwasannya mengawasi dan mengelola keuangan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, seperti tanggungjawab, memenuhi kewajiban finansial, kejujuran, efektifitas dan pengendalian (Hasrina, 2015). Adanya pengelolaan keuangan akan mendorong seseorang untuk menjalani gaya hidup yang penuh dengan prioritas yang jelas. Logikanya, kekuatan dan prioritas seseorang dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan mereka dalam mengelola keuangan mereka (Yushita, 2017).

Berdasarkan temuan amin et al pada tahun 2022 mendapatkan program KIP-K yang hampir ideal dalam sistem pelaksanaannya karena, selama implementasi masih sering terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan. Dihubungkan dengan hasil penelitian Aida pada tahun 2022 mengatakan ada masalah dengan informasi yang beredar tentang program KIP-K di universitas Diponegoro. Oleh karena akibatnya, menjadi suatu keharusan bagi semua orang agar dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Artinya, seseorang harus mampu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang benar-benar penting dan mengesampingkan keinginan yang sifatnya tidak mendesak. Terlepas dari kenyataan bahwa seseorang tidak ada yang dapat mengontrol keinginan dan kebutuhan orang lain,

namun setidaknya orang lain dapat memahami pentingnya membelanjakan uang secara bijak dan bertanggung jawab. Hal ini berlaku bagi semua kalangan, tidak terkecuali mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, mengelola keuangan dengan baik merupakan suatu keharusan. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan dan mengalokasikan dana dengan tepat. Dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang disiplin, mahasiswa dapat memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti biaya pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pengeluaran lainnya. Selain itu, mereka juga perlu belajar untuk menabung dan berinvestasi secara bijak agar dapat merencanakan masa depan yang lebih baik.

Kita ambil contoh tahun 2023, pemerintah berhasil menyalurkan bantuan pendidikan kepada lebih dari 700 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah dan 85 mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan (Kemendikbud Ristek, 2024). Jumlah penerima manfaat yang besar ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi. Berbagai persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat demi mendapatkan bantuan pendidikan KIP Kuliah. Namun, realitanya terdapat beberapa kekeliruan dalam penetapan penerima bantuan pendidikan, sehingga terjadi penyalahgunaan dana KIP Kuliah yang telah diterima. Sebagai makhluk ekonomi, orang-orang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Ditambah dengan perkembangan zaman yang terus menawarkan berbagai produk, kebutuhan dan gaya hidup manusia pun menjadi semakin beragam. Tidak terkecuali mahasiswa, mereka pun dapat memiliki kecenderungan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan gaya hidup dibandingkan kebutuhan esensial lainnya. Program Indonesia pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki tujuan untuk (astuti, 2017):

- 1) Meningkatkan jumlah angka partisipasi tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 2) Meningkatkan jumlah angka keberlanjutan Pendidikan yang ditandai dengan penurunan jumlah siswa yang meninggalkan sekolah dan jumlah siswa yang terus meningkat.
- 3) Mengurangi kesenjangan Pendidikan di antar kelompok sosial, termasuk yang kaya dan yang kurang mampu dalam segi finansial, antara pria dan wanita, antara desa dan kota atau antara daerah.
- 4) Meningkatkan kesiapan siswa sekolah menengah untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.

sebagai penerima KIP Kuliah, mahasiswa seharusnya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan terkait pendidikan, karena dana yang diberikan diperuntukkan untuk mencapai keberhasilan dalam menempuh pendidikan tinggi, bukan untuk menyesuaikan gaya hidup memenuhi gaya hidup. Sayangnya, dana beasiswa KIP Kuliah yang diberikan oleh pemerintah seringkali disalahgunakan oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Hal ini pasti tidak sesuai dengan tujuan utama program beasiswa KIP Kuliah, yaitu meratakan program Pendidikan kepada semua kalangan tanpa terkecuali masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam penentuan penerima KIP Kuliah agar dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan pendidikan mahasiswa. Dengan beberapa kajian dari peneliti terdahulu maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang progress dari implementasi dari KIP-K pada universitas yang ada di Indonesia.

(Fatimah sariri dan Indah Prabawati, 2022) yang berjudul Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya, KIP-K adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa yang berprestasi tetapi memiliki sumber daya keuangan yang terbatas untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Program pemerintah ini telah ada sejak tahun 2010 dengan program awal yaitu Bidikmisi. Pada tahun 2020, program ini berubah menjadi program kartu Indonesia pintar kuliah (KIP-K) sampai saat ini. Program KIP-K telah memenuhi harapan orang-orang Indonesia yang anak-anaknya dapat melanjutkan sekolah tanpa biaya. Tidak sama dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (diniyati et al, 2024) dimana dalam penerima beasiswa KIP-K ini Sebagian mendapatkan sisi positif dengan memanfaatkan sebagaimana mestinya yakni

sebagai pemenuhan kebutuhan Pendidikan. Namun, ditemukan juga penyalahgunaan dana KIP-K yang digunakan untuk pemenuhan tuntutan gaya hidup hedonisme, meskipun tidak ada dasar yang mengatur standar penggunaan beasiswa tersebut namun hal ini tentu saja keliru sebab tidak sesuai dengan tujuan dari KIP-K

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada studi kasus KIP-K. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitian, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan menekankan metode untuk menginterpretasikan informasi data, pendekatan melalui fenomena dalam konteks sosial dalam studi langsung, dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul diinterpretasikan dengan hasil penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci tentang subjek yang diteliti karena sudut pandang dan pengalaman peneliti yang berbeda (hasan et al, 2022) dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang berfokus pada gambaran.

atau menjelaskan subjek penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (harding & whitehead, 2013) menurut Creswell (2009: 25) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan membuat gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif rinci dari berbagai sumber dan melakukannya dalam lingkungan alami.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Beasiswa KIP-K

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diwajibkan untuk memastikan akses yang adil dan berkualitas tinggi ke pendidikan tinggi yang relevan dengan kepentingan masyarakat, tanpa terkecuali untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Maka dari adanya program KIP-K ini adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pemerataan pada sektor pendidikan di Indonesia,

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program perbaikan Bantuan Siswa Miskin (BSM), KIP sendiri adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan akses ke pendidikan secara menyeluruh dalam semua jenjang. (Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, 2024). Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diterima oleh semua anak usia sekolah yang juga merupakan pemegang dari beberapa Program Pendidikan Pintar (PIP) lainnya. Sejauh mana siswa berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dimaksud antara lain SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK. KIP merupakan bentuk implementasi dari program WAJAR selama 12 tahun (program belajar 12 tahun) bantuan dalam menempuh Pendidikan sampai tingkat SMA/MA/SMK. Dan apabila siswa penerima KIP akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka, program KIP tersebut berlanjut menjadi KIP-K. Menurut (Yusuf & Sari, 2022) Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan pembiayaan dari yang disubsidi oleh pemerintah disetiap semesternya kepada mahasiswa, dengan tujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa, sebagai bentuk penunjang pendidikan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi. Menurut buku Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 menyatakan bahwa pada tahun 2024 kemendikbudristek akan meminta bantuan dari 200 ribu mahasiswa yang menerima KIP Kuliah. Dalam hal ini diharapkan beasiswa yang diberikan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya tujuan awal KIP-K diberikan.

### Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan tindakan atau perbuatan yang berlebihan atau tidak semestinya. Pemerintah memberikan kenaikan kuota kepada calon penerima KIP-K setiap tahunnya. Untuk mendapatkan kuota tersebut berbagai cara dilakukan, hal ini



menyebabkan timbulnya persaingan dalam memperoleh kuota tersebut, sehingga tidak heran ditemukan kecurangan hingga penyalahgunaan yang terjadi. Sebagai bentuk moral harusnya beasiswa tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh penerima dan dimanfaatkan dengan tepat sesuai tujuan Pendidikan. Menurut James A.F. Stoner, perencanaan adalah salah satu cara untuk mengelola keuangan dengan baik, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun undang-undang khusus tidak mengatur hal tersebut namun dibutuhkan dimensi pengelolaan keuangan atas beasiswa Pendidikan yang disiapkan pemerintah agar dapat dikelola dengan baik bagi mahasiswa penerima KIP-K. Namun, disamping itu terdapat banyak kasus yang bermunculan dibalik suksesnya pelaksanaan program KIP-K.

Penyalahgunaan KIP-K adalah bukan hal yang mustahil lagi untuk tidak diketahui saat ini meskipun jarang diidentifikasi namun sudah menjadi rahasia umum akan kecurangan hingga penyelewengan yang terjadi didalamnya. Dalam praktiknya, kebanyakan penerima yang lolos mendapatkan beasiswa merupakan masyarakat yang tergolong dengan kondisi menengah keatas. Banyak dari masyarakat yang memanfaatkan program ini sebagai kesempatan untuk digunakan tidak sesuai fungsi dan tujuan. Contohnya pemenuhan gaya hidup hedonisme, dimana program ini bertujuan untuk menyejahterakan Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Beberapa kasus dari salah sasaran, korupsi dana KIP-K, salah satu contoh kasus yang sedang menjadi subjek perdebatan akhir-akhir ini adalah adanya mahasiswi dari beberapa kampus/Universitas ternama yang melakukan flexing yang mengatas namakan pekerjaan namun dibalik hal tersebut mahasiswa itu tercatat sebagai penerima KIP-K, seperti kasus yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Diponegoro berinisial CJM yang viral pada awal Mei lalu sumber: media sosial X @undipmenfess, dan juga oleh mahasiswi Universitas Brawijaya berinisial AYNK sumber : @ubmenfess. kasus ini dibagikan oleh salah satu website yang mana penulis tak lain sosok yang mengenal tersangka. Hingga akhirnya viral dan membuat keresahan karena menjadi bukti langsung akan tidak ketepatan sasaran kepada penerima yang benar-benar membutuhkan beasiswa tersebut. Tidak sesuai dengan tujuan awal beasiswa KIP-K ini direalisasikan sebagai pendukung biaya Pendidikan mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, dimana pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai moral merupakan suatu keharusan.

Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada:

1. Kerugian finansial bagi pemerintah : diakibatkan terjadinya salah sasaran, sehingga dirasa tidak tercapainya pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu
2. Kehilangan kepercayaan masyarakat : penyalahgunaan KIP-K menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada program-program sosial kemasyarakatan serta kinerja pemerintah dalam pemrosesan informasi, memanfaatkan kesempatan secara tidak jujur dan mengurangi dukungan masyarakat kedepannya.
3. Ketidaksetaraan Pendidikan : Selain itu sektor Pendidikan juga akan mengalami akibat dari penyalahgunaan KIP-K diantaranya bisa terjadi kesenjangan sosial yang terjadi kembali karena program tersebut tidak mencapai tujuan yang seharusnya, yang membutuhkan seperti biaya Pendidikan, bantuan biaya buku dan bantuan uang kuliah tunggal dan lainnya. Namun dimanfaatkan bagi yang tidak berhak mendapatkannya sehingga masyarakat kurang mampu semakin tertinggal dalam akses dan kualitas Pendidikan.
4. Kesenjangan sosial yang lebih besar : Tidak menyeluruhnya aspek Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu karena penyuluhan beasiswa yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Ketika akses beasiswa ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu maka terjadinya kesenjangan antara miskin dan kaya, kesempatan bagi orang mampu akan mendapatkan keuntungan sebaliknya anak yang membutuhkan akses bantuan ini akan kehilangan kesempatan.

Pentingnya memastikan dan terus mengawasi bahwa program-program bantuan sosial pemerintah seperti KIP-K agar dikelola dan disampaikan kepada masyarakat secara baik

dan transparan. Disamping dampak negatif dari penyalahgunaan tersebut diperlukan evaluasi secara terus menerus demi tercapainya tujuan mencerdaskan bangsa.

Beberapa solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kasus penyalahgunaan KIP-K yaitu:

1. Pengawasan  
Peningkatan pengawasan terhadap pemakaian KIP-K, pelaksanaan audit serta evaluasi terhadap aliran penggunaan dana dan laporan penggunaan KIP-K
2. Verifikasi  
Pemantauan serta verifikasi data yang lebih ketat dan pembaruan data, memeriksa calon penerima KIP-K memenuhi syarat dana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3. Edukasi dan kesadaran masyarakat  
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara merata dan langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan serta manfaat KIP-K
4. Pelatihan  
Melakukan pelatihan kepada penerima tentang guna dan manfaat penggunaan KIP-K secara efektif dan sesuai dengan tujuannya, penggunaan dana sesuai dengan kepentingan biaya Pendidikan dan dilaporkan penggunaannya secara transparan.
5. Hukuman bagi pelanggar  
Memberikan sanksi bagi pelanggar yang melakukan penyalahgunaan dana KIP-K.
6. Peningkatan transparansi  
Pemerintah melaksanakan sikap transparansi dalam pengelolaan serta pemakaian dana KIP-K.

Bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan program-program sosial masyarakat yaitu dengan terus melakukan pengembangan serta evaluasi secara berkala, membuat terobosan baru yang diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan KIP-K dan meningkatkan efektivitas dari program-program bantuan sosial.

Dari beberapa hasil Penelitian sebelumnya dikatakan bahwa lingkungan kampus dapat menjadi titik awal perilaku konsumtif dari perilaku pamer dan gaya hidup konsumtif akibat tuntutan lingkungan sekitar (qurrotuaini, et al., 2022) berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh diniyati, et al.,(2024) beasiswa KIP-K membantu dalam pemenuhan biaya hidup serta Pendidikan, penerima juga bertanggung jawab dan berlaku bijaksana atas pola konsumsi atas dana beasiswa yang diberikan dengan bukti skala prioritas penunjang perkuliahan. Menurut Afiefa, et al., (2023) dari penelitiannya mengemukakan bahwa meskipun biaya pendidikan kartu indonesia pintar (KIP) telah mencapai target, biaya hidup penerima KIP masih jauh dari tujuan dan target utama penyaluran dana KIP. Menurut Rohmah, Kasmawanto (2022) menyatakan dalam penelitiannya mengenai adanya kendala dalam komunikasi dan sumber daya mahasiswa yang tidak mematuhi aturan khusus dalam proses pengumpulan data. Menurut Fitriani, et al., (2020) menyimpulkan bahwa terdapat masalah dalam perekrutan penerima KIP yaitu tidak lain kasus kecurangan dalam penyaluran dana program KIP

#### IV. KESIMPULAN

Dari beberapa data yang sudah kami kumpulkan diatas dapat diperoleh kesimpulan Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) adalah versi ideal dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan beasiswa yang diberikan pemerintah untuk membantu calon mahasiswa yang kurang mampu dalam melanjutkan Pendidikan sebagai salah satu Langkah pemerintah dalam meratakan sektor pendidikan dengan tujuan utama mencerdaskan bangsa, beasiswa ini memberi bantuan berupa biaya hidup dan Pendidikan.

Dalam pola pengeluaran dana beasiswa oleh penerimanya masih minim tanggungjawab atas tujuan serta moral dalam pemakaian dana sehingga masih banyak kasus penyalahgunaan penggunaan KIP-K diluar fungsi, menjadikannya sebagai sarana pemenuhan gaya hidup hedonisme serta banyak kasus salah sasaran. Tidak ada dasar resmi undang-undang yang diberlakukan namun secara tidak langsung penggunaan diluar tujuan utama adanya KIP-K juga merupakan pelanggaran sosial dikarenakan bertentangan.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) adalah penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Pemerintah mulai inisiatif mulia untuk mewujudkan cita-cita leluhur negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan bahwa program KIP-K akan membantu calon siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan pendidikan tinggi. Meskipun pada prinsipnya dana beasiswa KIP-K telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan mulianya, namun disayangkan masih terdapat sejumlah pelanggaran berupa penyalahgunaan dana yang justru menyimpang dari esensi program tersebut. Faktor lingkungan dan budaya konsumerisme yang berkembang menjadi pemicu utama terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan dana beasiswa. Selain itu, proses pengajuan yang rumit serta persyaratan yang ketat turut menjadi kendala tersendiri, yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaktepatan dalam penentuan penerima manfaat.

Pada penelitian ini juga mengungkapkan dampak dan pengaruh dari praktik penyalahgunaan dana KIP, sekaligus mengevaluasi progress implementasi program tersebut di berbagai universitas di Indonesia. Temuan dari kajian-kajian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam, Dimana sebagian mengungkapkan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, sementara sebagian lainnya justru menemukan adanya penyalahgunaan dana untuk memenuhi gaya hidup hedonism. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti ini berusaha mengumpulkan data melalui studi kasus KIP-K dan menginterpretasikannya secara mendalam guna memahami subjek yang diteliti.

## REFERENSI

- Afief, N. K., & Ahmad, M. (2023). Kartu Indonesia Pintar (KIP) Scholarship: Target Reached or Missed?. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(3), 1316-1331. <https://doi.org/10.51276/edu.v4i3.505>
- Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi", *Jurnal Nominal*, Volume VI Nomor 1. 2017, hlm. 20.
- Amin, A., Sasongko, R. N., & Yuneti, A. (2022). Kebijakan Kartu Indonesia Pintar untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 5(1), 98–107. <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>
- Apriyani Br Rangkuti, P., Hanum, F., Lestari, D., Manajemen, J., Ekonomi, F., Islam, B., ... Medan, U. (2023). Manajemen Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 38–43. Retrieved from <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- (Cahyaningsih et al., 2018; Dianti, 2017; Yusup et al., 2019) Cahyaningsih, R. I., Kristen, U., & Wacana, S. (2018). *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar ( KIP )*. 18(2), 93–100.
- Dianti, Y. (2017). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>
- Dicky Djatnika Utama, 2019, "Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, hal. 1-12
- Diniyati, A. I., Fadillah, G., Anggina, L., Prasetya, R., Salsabila, S., Morowati, S. E., & Rozak, R. W. A. (2024). Pola Pengeluaran Penerima Beasiswa KIP KULIAH: Prioritas Penggunaan Dana Antara Kebutuhan Esensial dan Gaya Hidup. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital*, 1(2), 81-93.
- Harding, T., & Whitehead, D. (2013). *Analysing data in qualitative research* (pp. 141–160).
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Penerbit Tahta Media.



- <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>
- Hatimah, H. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRIORITAS KEUANGAN MAHASISWA BIDIKMISI DAN KIP KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM ANGKATAN 2019-2022 (Universitas Islam Negeri Mataram). Universitas Islam Negeri Mataram. Retrieved from <https://etheses.uinmataram.ac.id/4058/>
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85-104. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2886>
- Rofiq Nur Rizala, 2015, "Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 16, No. 1, hal. 15-30
- Rizky Trianti, 2018, Pelayanan Sosial Sekolah Gratis Bagi Anak Keluarga Miskin di Sekolah Bisa Bintaro, Tangerang Selatan. Unpublished Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238-251. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>
- Santoso, H.M., Sarjono.Y., Wafroturrohmah. (2014). Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24, No. 2, hal: 35-44.
- Wardah Qurrotuaini, P., Puspitasari, D., Rohmah, N., Nurul Fatimah, A., & Yanti Hami Mullah, N. (2022). Analisis Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi-Kip Kuliah Angkatan 2020 Uin Raden Mas Said Surakarta. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(1), 147–168. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i1.5718>
- Yunita Hasrina, "Analisis Pengelolaan Keuangan RIS-PNPM di OMS Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas". *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 13 No. 4, Desember 2015, hlm. 477.
- Yusuf, E., & Sari, W. (2022). Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2496>
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>